



# Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

## Rapor Merah Reformasi Birokrasi



# Sinergitas



**A**pa yang dipahami jika kita mendengar kata sinergitas? Kalimat ini sering kali terdengung seakan menjelma dalam setiap pertemuan dua unsur organisasi atau lebih, dengan harapan tercapainya maksud tertentu.

Nyatanya benar adanya. Manusia tidak dapat hidup tanpa sinergitas dengan sesuatu yang lain. Baik manusia, alam, hewan atau apapun, semua dalam rangka membangun kerangka kerjasama (sinergi) sehingga tercapainya roda kehidupan.

Dalam praktiknya, istilah sinergitas terbukti memiliki kekuatan yang luar biasa dalam meraih tujuan. Lalu bagaimana dengan pemerintah, perlukah sinergitas terjadi?

Tentunya, baik pemerintah eksekutif dan legislatif senantiasa membutuhkan sinergi dari seluruh unsur: masyarakat sipil, ASN, pejabat, akademisi, pengusaha, mahasiswa dan seluruh pihak lainnya. Tanpa itu semua,

kebijakan, aturan pemerintah memberikan pelayanan publik tentu tak dapat terwujud.

Tak berlebihan, jika dikatakan dalam praktiknya sinergitas sudah terbukti memiliki kekuatan yang luar biasa dalam meraih tujuan seseorang maupun organisasi dengan cepat.

Beriringan dengan edisi Juli 2022, korps Bhayangkara menginjak usianya ke 76. Hari kepolisian nasional itu diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 1946. Peraturan tersebut menyatukan kepolisian yang semula terpisah sebagai kepolisian daerah menjadi satu kesatuan nasional.

Segegap jajaran redaksi majalah Cirebon Katon mengucapkan, selamat HUT Bhayangkara ke 76. Semoga senantiasa bersinergi, semakin profesional, modern, terpercaya dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Bravo Polri. Salam Cirebon Katon!



## Pembina/Penasehat :

**H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si**  
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Rudiana, SE**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Teguh Rusiana Merdeka, SH**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Drs. H. Subhan**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

## Pengarah :

**Hj Eriati**  
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah  
(Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

**Munawir, SH.**  
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

**H. Sofwan, S.T**  
(Ketua Komisi 1)

**Pandi, S.E**  
(Ketua Komisi 2)

**Anton Maulana, S.T, M.M**  
(Ketua Komisi 3)

**Aan Setiawan, S.Si**  
(Ketua Komisi 4)

## Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

**Ikin Asikin, S.Sos, M.Si**  
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

## Wakil Pimpinan Redaksi :

**Drs. Raden Chaidir Susilaningrat**  
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

**Drs. H. Sucipto, MM**  
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

## Redaktur Pelaksana :

**Handi Eko Prasetyo, S.Kom, MM**  
(Kasubag Humas dan Protokol)

## Redaksi Ahli :

**S. Yudi**

## Penyunting :

**Dra. Puti Amanah Sari**  
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

## Redaktur :

**Yusuf**

## Reporter :

**Supardi • Kustano • Muiz • Amir**

## Fotografer :

**Qushoy**

## Desain Grafis :

**Boyke Datu • Andri**

## Data dan Riset :

**Oman**

## Distribusi :

**Firman • Misbah**

## Korespondensi:

**redaksi.cika@gmail.com**

## Penerbit :

**Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**  
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon  
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



## 04 | FOKUS

Kementerian PANRB:  
Rapor Merah Reformasi Birokrasi

8 | Belum Optimal Sistem Merit Pegawai



## 16 | KILAS

Hadiri Peringatan HUT Bhayangkara ke-76



## 18 | PUBLIKA

Mohon Tangani Bau Busuk Limbah Laut



## 22 | LENSА

Rindu Gemerlap Pasar Malam



## 24 | PROFIL

Puti Amanah Sari  
Berkesan Saat Raih Juara Inovasi Forum Anak

## 28 | DINAMIKA

Komisi I Audit Hilangnya Aset Tanah  
Desa Serang Kulon

30 | Wajah Baru Alat Kelengkapan Dewan

32 | Konsultasi Raperda Perlindungan  
Perempuan dan Anak

34 | Berscepat Wujudkan Perda Perlindungan  
Perempuan



## 36 | INSPIRASI

UMKM Anake Mimi  
Tembus Pasar Singapura



## 38 | DESA

Bojong Wetan  
Senarai Asa Menggapai Desa Maju

## Kementerian PANRB: Rapor Merah Reformasi Birokrasi

Kementerian PANRB melaporkan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon dinilai masih rendah. Berada di urutan bawah. Mengapa terjadi?



*Pelantikan P3K Penda Kabupaten Cirebon*

**K**ementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), memberikan rapor merah terhadap reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2021 yang dinilai masih jelek. Pasalnya Kabupaten Cirebon hanya meraih skor sebesar 56,81 atau predikat cukup (CC).

Capaian itu hanya mengalami peningkatan 0,63 persen dari tahun sebelumnya sebesar 56,18 persen. Akibatnya pada tahun 2021, peringkat reformasi birokrasi di Kabupaten Cirebon berada di urutan ke 24 dari 27 kabupaten/kota.

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Pemkab Cirebon mendapat nilai komponen pengungkit 26,51. Sementara komponen hasil sebesar 30,30.

Hal itu diukur dari 6 aspek yang melatarbelakangi. Pertama, profesionalitas ASN yang hanya bera-

da di peringkat 25 dengan skor 39,76.

Kedua, nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang hanya meraih 2,00. Sehingga hanya menempati peringkat ke 21 di Jawa Barat. Ketiga, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai 1,91 atau berada di urutan ke 26.

Keempat, kualitas pengelolaan barang dan jasa yang hanya mendapat skor 11,02 sehingga menempatkan posisinya di juru kunci. Kelima, skor maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan skor 2,00 atau di urutan posisi ke 24.

Keenam, kualitas pelayanan publik dengan nilai 3,39. Sehingga hanya menempatkannya di urutan ke-22. Ketujuh, kepatuhan standar pelayanan publik yang hanya bertengger peringkat 27 dengan skor 52,62.

Terakhir, kualitas pengelolaan arsip yang memperoleh skor 67,79 atau berada di peringkat 8 Jawa Barat.

Atas evaluasi ini, capaian pelaksanaan reformasi



birokrasi Kabupaten Cirebon tahun 2021 menempati peringkat 24 di Jawa Barat. Kalah jauh dari Pemerintah Kota Bandung yang meraih indeks RB terbaik di Jawa Barat dengan predikat BB atau sebesar 72,66.

Kementerian PANRB menilai reformasi birokrasi di Kabupaten Cirebon masih sangat lambat.

Oleh karenanya, Kementerian PANRB memberikan catatan yang perlu disempurnakan.

Pertama, perlunya penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah kabupaten dan perangkat daerah. Kedua, merumuskan pola *change* manajemen yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Cirebon.

Ketiga, melakukan internalisasi *core values* ASN berakhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 area pembangunan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi terhadap seluruh pegawai.

Selanjutnya tak kalah penting, yakni menyempurnakan peta keterkaitan antar kebijakan yang telah disusun, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Kabupaten Cirebon untuk disinkronkan.

Kelima, menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan mengevaluasi peta bisnis secara berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan optimal.

Selain itu, meningkatkan peran manajemen Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di

Kabupaten Cirebon sesuai dengan arsitektur SPBE yang ditetapkan skala nasional.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM, Kementerian PANRB menyarankan agar Kabupaten Cirebon mengaudit seluruh pegawai dan menindaklanjuti pemanfaatan hasil pengamatan.

Kedelapan, menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara menyeluruh serta mengidentifikasi celah perbaikan lain.

Kesembilan, mengoptimalkan pengawasan kebijakan internal dan mengoptimalkan peran APIP. Selanjutnya meningkatkan pembangunan zona integritas pada seluruh unit kerja yang strategis.

Terakhir, pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan implementasi pemberian kompensasi apabila layanan tidak sesuai standar secara merata.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Drs Subhan mengatakan, pentingnya reformasi birokrasi harus dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal itu agar harapan tercapainya reformasi birokrasi dapat terwujud

“Persoalannya sekarang, sudahkah Kabupaten Cirebon menyeriusi itu. Saya kira belum. Padahal reformasi birokrasi adalah perintah undang-undang. Maka tidak aneh kalau nilainya masih rendah di Jawa Barat. Itu harus jadi evaluasi,” pungkasnya. •Iz

# Reformasi Birokrasi Rendah, Visi Misi Disoal

Gagalnya reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon diakui karena nihilnya reformasi birokrasi dalam visi-misi daerah. Benarkah?



Indeks reformasi birokrasi yang menempatkan Kabupaten Cirebon berada di urutan ke 24 atau predikat (cc) skala Jawa Barat, menjadi bukti jika pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Cirebon dinilai belum optimal.

Hal itu dapat dilihat dari beberapa aspek salah satunya mengenai kualitas pelayanan publik (yanlik). Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto mengakui kualitas pelayanan publik Kabupaten Cirebon berada di peringkat 22 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

“Betul, kalau berdasarkan penilaian provinsi kualitas pelayanan publik memang ada di peringkat 22 dengan skor 3,39. Itu diukur dari 2 dinas yakni DPMPSTP dan Disdukcapil,” kata Novi.

Namun Novi menganulir untuk penilaian nasional dua dinas tersebut telah mengantongi predikat baik.

“Iya berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), pelayanan publik di Kabupaten Cirebon justru sudah baik dengan predikat (B),” jelasnya.

Novi beranggapan, penilaian oleh provinsi hanya bertujuan agar seluruh kabupaten/kota berlomba-lomba mencapai nilai reformasi birokrasi ideal.

Ia pun menilai, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah kunci yang harus diutamakan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kalau soal reformasi birokrasi, kuncinya ada di peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di seluruh OPD Kabupaten Cirebon. Kalau yanlik kita baik tentu akan berdampak terhadap nilai reformasi



birokrasi,” katanya.

Ia pun mengakui, sejauh ini pelayanan publik Kabupaten Cirebon belum optimal. Hal itu dapat diketahui penyebabnya dari kondisi sarana prasarana (sarpras) yang tak memadai. Padahal sarpras merupakan hal penting dalam mewujudkan pelayanan publik.

“Misalkan di Disdukcapil, pastikan di sana ada toilet khusus untuk penyandang disabilitas, dan pelayan khusus saat pertama kali masuk pintu. Seperti saat mengunjungi bank, kita sudah disapa oleh pegawai. Nah kalau di Kabupaten Cirebon memang belum punya,” ungkapnya.

Sehingga sudah seharusnya perlu perbaikan kualitas pelayanan publik terutama OPD tertentu. Novi menyatakan, reformasi birokrasi merupakan tugas bersama perangkat daerah. Ia juga berharap peran serta DPRD agar bersedia bersinergi bersama mewujudkan wajah baru birokrasi yang lebih baik di Kabupaten Cirebon.

“Tidak hanya kami selaku eksekutif, tapi daya dukung dari bapak-bapak anggota dewan juga secara tidak langsung memiliki keterkaitan juga, misalkan dari segi penganggaran maupun kebijakan,” jelas Novi.

Novi mengungkapkan, upaya reformasi birokrasi belum tercapai juga disebabkan karena nihilnya visi misi daerah untuk mencapai birokrasi yang ideal.

“Reformasi birokrasi belum tercantum sebagai visi-misi daerah. Padahal seharusnya reformasi birokrasi masuk menjadi misi dari pemerintah daerah. Jadi belum ada skala prioritas ke sana,” jelas Novi.

Meski demikian, Novi mengatakan telah membuat rencana aksi reformasi birokrasi



Novi Hendrianto (PLT Bagian Organisasi)



pada tahun 2022.

“Rencana aksinya sudah ada, tapi menurut kami akan lebih efektif reformasi birokrasi bisa menjadi bagian dari program masing-masing perangkat daerah, khususnya yang mengampu aspek reformasi birokrasi,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Drs Subhan mengkritisi nihilnya visi-misi daerah mengenai reformasi birokrasi. Padahal Undang-Undang mengharuskan agar reformasi birokrasi menjadi acuan

pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, menjadi acuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kalau belum ada seharusnya itu segera dicantumkan dalam visi misi bupati. Itu sudah tuntunan undang-undang. Kalau kami di DPRD sudah pasti mendukung kalau itu baik untuk Kabupaten Cirebon,” tegas Subhan. •Par

# Belum Optimal Sistem Merit Pegawai

Tak optimalnya penerapan merit sistem dalam promosi jabatan ditengarai jadi penyebab, reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon sulit tercapai.



**W**akil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Drs Subhan menilai, tak tercapainya reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon disebabkan karena belum optimalnya penerapan sistem merit dalam memilih maupun merotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menjelaskan, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, yang diberlakukan secara adil serta wajar dengan tanpa diskriminasi.

Menurut Subhan, polemik mutasi, rotasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi penyebab mengapa reformasi birokrasi sulit tercapai. Oleh karenanya, ia pun menegaskan pentingnya memahami makna dari reforma-

si birokrasi.

“Reformasi birokrasi adalah sebuah keharusan. Selain untuk kenyamanan masyarakat juga bentuk menaati undang-undang,” jelas Subhan.

Dia tak memungkiri jika hasil reformasi publik yang baik adalah terwujudnya peningkatan pelayanan publik. Namun untuk mencapai itu, kuncinya pemilihan kandidat atau pejabat yang akan mengemban amanah, adalah mereka yang kompeten sesuai bidangnya.

“Pelayanan Publik itu golnya, tapi pemerintah daerah harus memilih kandidat yang punya talenta dalam bidangnya, dengan sesuai undang-undang yang ada,” tambahnya.

Pelayanan publik akan meningkat jika para pegawai yang menempati instansi mampu menguasai bidang tersebut. Dia pun berharap, Kabupaten



Cirebon sudah harus berubah menjadi lebih baik lagi.

“Kami di DPRD tentu mendorong agar reformasi birokrasi ini akan bisa tercapai, karena Kabupaten Cirebon harus berkembang,” tegasnya.

Ia pun mendorong agar Pemerintahan di Kabupaten Cirebon bisa segera berbenah. Peringkat 24 dari 27 daerah di Jawa Barat bukanlah prestasi melainkan hal buruk yang harus segera dibenahi.

“Kami di DPRD tentu mengharapkan semoga reformasi birokrasi di Kabupaten Cirebon bisa tercapai. Jangan setengah

hati untuk reformasi birokrasi,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Diah Irwany Indriyati juga menuturkan hal serupa. Menurut Diah, Pemerintah Kabupaten Cirebon harus benar-benar mengoptimalkan penerapan sistem merit dalam menempatkan pegawai ASN sesuai dengan kapabilitasnya.

Menurutnya, penempatan ASN yang kurang tepat akan mengakibatkan pada pencapaian dan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, sehingga berpengaruh pada pen-

capaian reformasi birokrasi.

“Dengan menggunakan merit sistem, ASN akan mampu menganalisa masalah di bidangnya dengan tepat, dan tahu apa yang harus dilakukan. Dampak yang akan terjadi ketika ASN tak sesuai bidangnya menempati jabatan tertentu, maka pelayanan publik tidak optimal,” kata Diah.

Selain itu, Diah menuturkan pentingnya pengadaan fasilitas pelayanan publik yang memadai hingga penempatan yang mudah diakses oleh masyarakat.

“Masyarakat kan menilainya apa yang bisa dilihat dan tampak. Jadi saat bangun fasilitas publik, penempatan juga dipikirkan, yang sekiranya mudah diakses oleh masyarakat,” tuturnya.

Meski demikian, Analis Kepegawaian di BKPSDM Prio Ilham Mutadin mengaku, jika penerapan sistem merit di Kabupaten Cirebon telah dilakukan dan mencapai nilai predikat baik.

“Tahun lalu sistem merit kita sebenarnya sudah mencapai skor 256. Tapi tahun 2021 kemarin kita tidak mengikuti audisi penilaian, jadi tidak dapat nilai,” ungkap Prio.

Ilham mengatakan, promosi jabatan pegawai telah dilakukan berdasarkan penilaian yang lebih terstruktur dan memiliki indikator sebelum pegawai dirotasi.

“Berbeda jauh dengan dulu yang cukup direkomendasikan pimpinan. Kalau sekarang lebih terstruktur,” katanya.

Apa yang disampaikan Ilham berbeda jauh dengan laporan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencatat indeks sistem merit Kabupaten Cirebon tahun 2021 berada di urutan terbawah dengan nilai 0,00. Sementara profesionalitas ASN berada di urutan ke 25 dengan nilai 32,24. • Par



# Delapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Sejumlah rencana aksi telah disusun Pemkab Cirebon guna mencapai sasaran reformasi birokrasi di tahun 2022. Seperti apa?



**D**alam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi tahun 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berupaya mengubah wajah birokrasi. Hal itu ditandai dari rencana aksi reformasi Kabupaten Cirebon melalui 8 area perubahan yang dicanangkan.

Kepala Sub Koordinator Reformasi Birokrasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Muslih

menyebut, aksi pertama yakni pembentukan tim reformasi birokrasi, penguatan tim reformasi birokrasi, sosialisasi dan internalisasi budaya kerja dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi.

Kedua, penguatan pengawasan gratifikasi, kampanye publik, dan membangun lingkungan pengendalian, pengendalian dan pemantauan internal pemerintah kepada seluruh pihak terkait.

Kemudian penanganan pengaduan masyarakat,



menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat, mengevaluasi penanganan pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti hasil pengaduan.

Ada juga program Whistle Blowing System, penanganan benturan kepentingan, pencanangan zona integritas, menata SKPD atau unit kerja yang akan dikembangkan menjadi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Berikutnya pengoptimalan APIP, baik secara SDM dan kuantitas maupun kualitas, mendukung anggaran atas pelaksanaan APIP, melaksanakan fungsi pengawasan dan internal berbasis risiko.

Program ketiga, area penguatan akuntabilitas. Ada uraian aksi mendorong keterlibatan pimpinan SKPD dalam penyusunan strategis, mendorong keterlibatan pimpinan SKPD, mendorong setiap pimpinan memantau kinerja secara berkala.

Selain itu meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, mengembangkan penyusunan indikator kinerja individu berbasis elektronik, mengembangkan penyusunan laporan kinerja individu bulanan sesuai perjanjian kinerja yang ditetapkan.

Keempat, penguatan kelembagaan. Uraian aksi

pada area ini yakni mengevaluasi organisasi atau kelembagaan, menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengajukan perubahan organisasi atau kelembagaan.

Kelima, penguatan tatalaksana. Uraian aksinya mendorong SKPD khususnya unit pelayanan memiliki standar operasional pelaksanaan (SOP) sesuai tugas dan fungsinya.

Ada juga program penyusunan rencana pengembangan e-government di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, melaksanakan pengembangan e-government, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja terintegrasi, pengembangan sistem penyediaan layanan informasi dan pengaduan transaksional.

Selain itu, membentuk tim yang menangani keterbukaan informasi publik, membuat peraturan bupati tentang keterbukaan informasi publik, melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik, mengembangkan kebijakan informasi publik, melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Keenam, penguatan SDM ASN. Terdapat uraian aksi penyempurnaan hasil jabatan analisis jabatan analisis beban kerja, melakukan penghitungan kebutuhan pegawai seluruh SKPD, menyusun rencana redistribusi pegawai dan menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun.

“Kita mencanangkan setiap pengumuman penerimaan pegawai diumumkan secara luas, transparan, obyektif, adil, akuntabel dan bebas KKN serta seleksi diinformasikan secara terbuka,” ujar Muslih.

Selain itu, menyusun standar kompetensi jabatan, melaksanakan assesment pegawai, melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi, menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dan melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai,

Selanjutnya menyusun kebijakan promosi secara terbuka, menyusun rencana kebijakan promosi jabatan secara terbuka, kebijakan promosi secara terbuka untuk pimpinan tinggi, mengumumkan setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website.

Berikutnya menyusun kebijakan disiplin kode etik atau kode perilaku pegawai sesuai perundang-undangan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai. Selain itu, mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian sesuai kebutuhan.

Ketujuh, penguatan perundang-undangan. Uraian aksi pada area ini menyusun rencana kerja rancangan perundang-undangan, mengidentifikasi



si analisis dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang harmonis maupun membenahi produk hukum yang tidak sinkron dengan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, mengevaluasi sistem pengendalian atau SOP produk hukum daerah secara berkala. Berikutnya, penyusunan produk berkualitas, sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta pembinaan keluarga sadar hukum.

Terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Selama 2022 Pemkab Cirebon akan menetapkan kebijakan standar pelayanan, memaklumkan standar pelayanan di masing-masing SKPD, bidang perizinan, mendorong SKPD membuat SOP pada pelaksanaan standar pelayanan, melakukan identifikasi dan revisi atau perbaikan SOP perbaikan standar pelayanan

Selanjutnya, melakukan sosialisasi atau pelatihan dalam budaya prima, mempermudah akses informasi tentang pelayanan melalui berbagai media, melaksanakan perlakuan sanksi atau penghargaan

bagi pelaksana pelayanan publik, mengembangkan sarana terpadu integrasi, membangun dan mengembangkan inovasi pelayanan, operasionalisasi pelayanan perizinan investasi, serta peyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.

Setelah itu menetapkan kebijakan pengaduan pelayanan secara daring, menetapkan SOP pengaduan dan evaluasi atas penanganan pengaduan di SKPD, penanganan permasalahan penanaman modal terkait investasi.

Usai itu membangun atau mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi, melakukan evaluasi terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi, pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan, memperbaiki secara terus menerus pelayanan berbasis teknologi informasi, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik SKPD.

Kemudian pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi SINTREN (Sistem Informasi Terpadu Kependudukan), pembentukan pusat pelayanan kesehatan terpadu Sigap Cepat Eman Rakyat (SICERIA). • **Muiz**

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

## Terima Audiensi PWI Cirebon

**K**omisi III DPRD Kabupaten Cirebon menerima audiensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cirebon. Kedatangan sejumlah pengurus PWI dalam rangka menjalin silaturahmi dan sinergi serta menyampaikan masukan untuk mendorong akselerasi lembaga legislatif dalam mengentaskan persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon.

Ketua PWI Cirebon Alif Santosa menyampaikan, selain membangun sinergitas lembaga, ia berharap agar DPRD Kabupaten Cirebon lebih kritis terhadap persoalan sosial dan pembangunan daerah. Di antaranya mengenai pembangunan, infrastruktur

jalan, pendidikan hingga sampah.

“Kami menyoroti sejumlah masalah, terutama soal sampah dan infrastruktur jalan yang banyak menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujar Alif.

Merespon itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon menyambut baik atas kunjungan serta masukan dari perwakilan PWI Cirebon untuk DPRD. Anton mengatakan, akan segera menindaklanjuti apa yang sudah dibahas dalam pertemuan.

“Kita akan segera sampaikan masukan dari teman-teman PWI dalam rapat Komisi III,” ujar Anton.



# Tanggapi Keluhan Limbah Perusahaan

**K**etua DPRD Kabupaten Cirebon Mohammad Luthfi menerima audiensi Pemerintah Desa Astanamukti, Karang Taruna dan LSM Kompak berkaitan pengelolaan limbah milik PT Trimitra Citrahasa Cirebon yang dirasa tidak melibatkan warga lokal. Sebaliknya, PT Trimitra Citrahasa diduga hanya menggandeng perusahaan swasta asal Karawang.

Mereka pun menuntut agar PT Trimitra Citrahasa Cirebon memikirkan nasib dan kesejahteraan warga lokal yang terdampak nyata. Sejauh ini Pemdes Astanamukti mengungkapkan, warga tak dilibatkan dalam mengelola limbah, padahal telah mendapat rekomendasi dari pemerintah desa.

Selain itu, Pemdes Astanamukti juga meminta agar Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mendalami serta mengonfirmasi terkait klaim PT Trimitra Citrahasa yang mengaku telah mengeluarkan dana CSR untuk Pemdes. Padahal Pemdes Astanamukti sama sekali belum menerima. Sehingga mereka berharap DPRD dapat memberi solusi

Menanggapi hal tersebut, Luthfi berjanji akan berkomunikasi dan menindaklanjuti laporan itu dan akan membahasnya bersama pihak demi mencari solusi terbaik.

“Terimakasih atas audiensinya, kita akan bawa isu ini untuk Komisi II dan secepatnya kami sampaikan dengan pihak perusahaan,” jelas Luthfi.



# Hadiri Peringatan HUT Bhayangkara ke-76

**K**etua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon turut menghadiri upacara peringatan hari Bhayangkara ke-76 yang digelar secara *hybird*.

Puncak HUT Bhayangkara tahun ini dipusatkan di Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri, Semarang, Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu, Kapolresta Cirebon Kombes

Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H., menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, lembaga instansi yang sudah berkenan dan senantiasa bersinergi dengan Polresta Cirebon dalam menciptakan Kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Tentunya dengan semangat peringatan Bhayangkara 76 ini, kita berdoa agar kami dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan berupaya agar tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.



# Usulan Program Big Data Desa

**K**etua DPRD Kabupaten Cirebon Mohammad Luthfi mengatakan, pentingnya data faktual sebagai modal dasar dalam merumuskan sebuah program berkelanjutan. Untuk itu, Luthfi mengajak Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC) untuk ikut serta memotori pembuatan *big data* berbasis desa.

Menurutnya, *big data* bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan di ruang desa baik infrastruktur, pengangguran dan masalah lainnya. Ia mengungkapkan, jika data-data yang dimaksud dapat terkumpul dan tersusun dalam bentuk statistik, maka tahap

penyelesaian persoalan akan semakin mudah.

“Maka saya mengusulkan agar ada program *big data* yang kita lakukan dari desa,” ungkapnya, saat menghadiri kegiatan *Coffee Morning*.

Luthfi berharap, program *big data* yang diusulkannya bisa disambut baik semua pihak, terutama FKKC sebagai motor penggerakannya, sehingga akan menghasilkan *output* dan pilihan skenario program pembangunan yang unggul dan berkualitas.

“Mudah-mudahan programnya bisa terwujud di anggaran perubahan APBD 2023 mendatang,” ujarnya.



## Mohon Tangani Bau Busuk Limbah Laut



*Assalamu'alaikum wr wb.*

Saya Ruhyat, ingin melaporkan dampak pembuangan limbah dari hasil laut di wilayah Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura yang telah menimbulkan masalah lingkungan. Di antaranya, pencemaran udara karena bau yang tak sedap. Meski para nelayan mungkin telah akrab dengan bau busuk itu, namun sangat disayangkan jika kondisi tersebut dibiarkan terus-menerus.

Selain berpotensi menimbulkan masalah bagi lingkungan itu sendiri, kami khawatir kondisi tersebut akan berdampak pada kesehatan. Untuk itu, diperlukan upaya edukasi warga sekitar terutama bagi para pelaku usaha yang menggeluti sektor perikanan agar lebih disiplin dalam menangani limbah sisa produksi.

Saya berharap limbah hasil laut ini bisa segera ditangani atau minimal perlu diawasi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

*Wassalamu'alaikum wr wb.*

**(Ruhyat/Wiraswasta/Mundu)**

## Ratusan Unit Lampu Jalan Mati

*Salam hormat Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Saya Alan (35) asal Desa Jatianom. Saya ingin melaporkan kondisi sejumlah fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur pantura Kecamatan Susukan hingga Palimanan yang tidak berfungsi. Setidaknya ada lebih dari 200 unit PJU dalam kondisi mati yang membuat resah pengguna jalan terutama pemotor.*

*Belum diketahui secara jelas mengapa ratusan unit PJU tidak menyala, namun yang pasti kondisi tersebut sudah berlangsung lama.*

*Keberadaan unit PJU di jalur pantura memegang peran vital untuk menjaga kondusifitas, kenyamanan serta keamanan terutama di wilayah yang rawan aksi kriminal. Oleh karenanya, saya berharap ada upaya perbaikan PJU, mengingat di beberapa wilayah pantura terkenal akan aksi tindak kejahatan seperti curas, curat dan curanmor (3C). Terimakasih Cirebon Katon berkenan menerbitkan.*

**(Alan/Karyawan/Jatianom)**



## Saran Wahana Balap Motor Sport



*Assalamualaikum wr wb.*

Minimnya sarana olahraga balap jalanan (road race) di Kabupaten Cirebon berdampak pada maraknya aksi balap liar remaja yang kian menjamur. Kurangnya wahana untuk menyalurkan bakat membuat mereka tidak punya pilihan selain melampiaskan hasrat kompetisi di jalanan umum.

Kendati demikian, aksi balap liar yang sering kita jumpai tidak melulu dilihat negatif. Tak sedikit pelaku otomotif yang akhirnya terpaksa memanfaatkan sepiunya kondisi jalan karena hobi. Melihat fenomena tersebut, saya kira sudah saatnya bagi Cirebon membangun lintasan balap yang mendukung untuk mengakomodir kebutuhan mereka.

Sehingga dapat menyaring bakat-bakat potensial atlet motor sport yang berpotensi mengharumkan nama daerah.

*Wassalamu'alaikum wr wb.*

**(Rio/Pehobi Motorsport/Tengahtani)**

## Awasi BBM Subsidi Eceran

Sejak terbitnya aturan wajib menggunakan aplikasi milik Pertamina mulai diuji coba sebagai syarat pembelian BBM bersubsidi, keberadaan bensin jenis Peralite di sejumlah SPBU kian sulit didapat. Masyarakat terpaksa membeli BBM non subsidi jenis Pertamina dengan harga hampir dua kali lipat.

Imbas dari kebijakan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap sektor industri, tarif transportasi pun ikut melambung bersamaan dengan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi.

Namun di tengah kondisi tersebut, ada satu kejanggalan di sejumlah penjual bensin eceran. Stok mereka (pengecer) bisa dikatakan cukup melimpah. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan SPBU yang notabene penyuplai resmi.

Saya harap ada pengawasan terkait kejadian tersebut. Mengingat untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM.

**(Wahyu/Guru/Cirebon)**



## Pemdes Cipeujeuh Kulon Akan Bangun Agrowisata Mangga Gincu

Pemdes Cipeujeuh Kulon akan bangun agrowisata kebun mangga yang besar untuk bantu petani pasarkan mangga hingga tingkatan pendapatan desa. Seperti apa?



**D**esa Cipeujeuh Kulon dikenal menjadi salah satu desa penghasil buah mangga terbesar di Kabupaten Cirebon. Tak ayal, ketika berkunjung ke desa tersebut, ratusan pohon mangga jenis gedong gincu tampak berjejer di sepanjang jalan.

Kualitas mangga gedong gincu khas Desa Cipeujeuh Kulon dinilai tak kalah dengan daerah penghasil mangga terbaik lainnya seperti Indramayu.

“Di Indramayu juga ada mangga, tapi hanya mangga biasa, cuma sedikit yang digincukan. Jika mangga gincu kami rasanya beda, warnanya juga sedikit berbeda,” jelas Lili Mashuri, Kuwu Desa Cipeujeuh Kulon kepada Cirebon Katon.

Mangga gedong gincu memiliki perawatan khusus sehingga harganya terpaut naik dengan mangga jenis lainnya.

“Buahnya itu dibungkus menggunakan kertas, nanti akan matang di pohon. Rasanya lebih enak, jadi harganya juga lebih mahal,” ungkap Mashuri.

Saat ini, mangga khas Cipeujeuh Kulon diakui telah terjual ke berbagai daerah dari Jakarta hingga Sumatera.

“Sebenarnya penjualan sudah sampai Jakarta dan Sumatera, dan kalau ditanya keuntungan lumayan menguntungkan. Sekali panen kita bisa mendapatkan keuntungan 3 kali lipat dari modal tergantung iklim,” kata Mashuri.

Oleh karenanya, Pemerintah Desa Cipeujeuh Kulon berencana mengembangkan perkebunan mangga tersebut dengan mendirikan agrowisata mangga.

“Betul sekali, saya berencana membuat agrowisata kebun mangga. Karena Desa Cipeujeuh Ku-



lon sangat dikenal pada sektor perkebunan mangga,” ujarnya.

Lahan seluas 20 hektare akan disulap jadi wisata mangga dan diyakini akan mampu menarik para wisatawan. Mashuri berkeinginan, kehadiran agrowisata dapat dirasakan manfaatnya untuk membantu para petani mangga memasarkan hasil panen. Dan berharap akan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Sumber daya alam di Cipeujeuh Kulon kan lumayan luas, se-

lain itu saya juga ingin membantu para petani agar lebih mudah dalam penjualan jika masa panen tiba. Sehingga sudah keharusan agrowisata tersebut segera diwujudkan,” kata Mashuri.

Sebelumnya, Mashuri merasa prihatin karena para petani mangga kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panen mangga gedong gincu, karena itu agrowisata mangga diharapkan menjadi solusi.

“Kalau kita buat agrowisata, kita tidak perlu susah-susah cari

pembeli, nanti mereka sendiri yang akan datang kemari. Kami Pemdes sangat bersedia menjadi jembatan antara petani dan pembeli,” terangnya.

Selain itu, melalui agrowisata Mashuri berharap, pemulihan ekonomi dapat terwujud setelah pandemi menghujam sehingga Desa Cipeujeuh Kulon akan semakin dikenal masyarakat luas.

Tak hanya itu, selain menghadirkan perkebunan mangga, agrowisata dapat menjadi pilihan tempat wisata keluarga. Para wisatawan akan bisa memetik mangga dari pohon langsung maupun berkeliling menikmati pemandangan sekitar.

“Memang ke depannya kalau agrowisata ini jadi para pengunjung boleh memetik mangga langsung dari pohon khusus jenis mangga gincu. Jadi kesannya lebih alami dan terlihat menarik,” kata Mashuri.

Mashuri meyakini lokasi agrowisata mangga gincu akan dipadati pengunjung jika telah dibuka karena akses jalan yang bagus dan mudah ditemukan.

“Tidak terlalu masuk ke hutan, jadi memang pilihan sekali untuk wisatawan pecinta buah mangga khususnya. Jalan di sini sudah bagus,” jelasnya.

Meski demikian, Mashuri tetap berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat membantu Pemdes Cipeujeuh Kulon mewujudkan agrowisata mangga gincu. Sejauh ini, Mashuri harus memutar otaknya mencari anggaran untuk pembangunan wisata desa tersebut.

“Meski harus bersusah-payah mengalokasikan anggaran saya tidak menyerah. Kami juga berharap pemerintah daerah ataupun pusat bisa lebih perhatian dengan potensi yang ada di desa termasuk desa kami,” pungkasnya. •Par



## Rindu Gemerlap Pasar Malam

Sudah dua tahun lamanya, pasar malam pra haul masyarakat Buntet Pesantren Cirebon itu sempat terhenti.

Kini, masyarakat Desa Mertapada Kulon, Astanajapura, kembali diriuhan dengan kehadiran pasar malam.

Para pedagang dan penyedia wahana permainan berbondong-bondong meramaikannya.

Ada kora-kora, lmbak banyu, rumah hantu, tong setan, hingga biang lala dan komedi putar.

Masyarakat yang rindu akan hiburan rakyat menyambut gembira akan adanya pasar malam ini.

“Karena baru ada lagi tahun ini, jadi tiap sore sampai malam selalu ramai,” ujar Alam, salah satu pedagang kaki lima.

Bagi Alam, pasar malam momentum untuk memulihkan pendapatannya.

“Meski cuman 20 hari, kehadiran pasar malam sangat berdampak bagi saya karena menambah pemasukan,” katanya. •Soy



## Puti Amanah Sari

# Berkesan Saat Raih Juara Inovasi Forum Anak

Puti tak menyangka, jika inovasi program forum anak yang digagasnya akan meraih juara saat masih menjabat di DPPKB. Bagaimana kisah sosok satu ini?

Perempuan satu ini dikenal telah aktif mengikuti organisasi sejak ia masih duduk di bangku sekolah.

Sebut saja saat masih berseragam biru putih, Puti remaja, sangat aktif mengikuti olahraga ekstrakurikuler voli. Hobinya berolahraga terus ia lanjutkan hingga duduk di SMA, Puti aktif mengikuti ekstrakurikuler basket.

“Ya memang suka banget kalau dulu gabung ekstrakurikuler olahraga. Baru saat kuliah saja, saya bergabung dengan organisasi senat mahasiswa,” ungkap Puti.

Pemilik nama lengkap Puti Amanah Sari itu, saat ini tengah menjabat Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

Sebelum ia menduduki posisi ini, Puti telah malang melintang menduduki berbagai posisi di pemerintah daerah.

Meski demikian, perempuan kelahiran Bandung itu mengungkapkan, ia sempat tak memiliki aktivitas selama 11 tahun selepas lulus dari Universitas





Pasundan (UNPAS) karena harus menjadi ibu rumah tangga.

“Setelah lulus kuliah tahun 1992 saya menikah, dan menjadi ibu rumah tangga terlebih dahulu,” ungkap Puti.

Setelah dirasa anaknya sudah cukup dewasa, Puti mencari peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang tidak begitu menyita banyak waktu. Karena bagaimanapun ia harus memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Puti mengawali kariernya di dunia pemerintahan sebagai tutor paket A, B dan C di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sejak 2003 hingga 2008. Setelah itu Puti pun berlanjut ke dinas-dinas lain.

Puti sempat menjabat bidang sosial budaya di Bappelitbangda. Tak lama, ia beralih di KPU.

“Berlanjut saya pindah ke BKPSDM sampai tahun 2016, lalu saya dipromosikan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP-PKB),” tutur Puti.

Berkarir di DPPKB, bagi Puti merupakan pengalaman berkesan. Saat mengikuti Diklatpim 2017, Puti meraih juara sebagai perancang inovasi program mewakili DPPKB.

“Dulu tahun 2017, saya pernah menjadi juara pertama saat Diklatpim. Buat saya pengalaman tersebut sangat berkesan,” jelasnya.

Padahal, saat pertama ditunjuk, Puti sempat tak percaya diri untuk mengikuti diklat pimpinan tersebut.

Pasalnya, ia merasa belum menguasai bidang yang saat itu menjadi tugasnya. Belum lagi, melihat

peserta lain yang kebanyakan berpendidikan tinggi dan lebih muda.

“Saat itu saya di DPPKB belum lama, jadi benar-benar tidak percaya diri. Ditambah peserta lain berpendidikan tinggi, dari doktor sampai profesor,” katanya.

Namun inovasi Puti yang merupakan pembinaan anak dan remaja dinilai efisien dan sangat sesuai dengan realitas yang ada. Dia mendapat apresiasi juara pertama atas inovasinya tersebut.

“Inovasi saya dulu sangat sederhana yaitu membuat forum anak, tujuannya memberi ruang positif untuk anak berkumpul dan belajar,” jelas Puti.

Berbeda dengan peserta lain yang memerlukan anggaran ratusan juta untuk pembuatan aplikasi, Puti merancang inovasi mudah yang tak perlu biaya besar.

Bahkan, kabarnya inovasi forum anak hasil gagasan idenya masih digunakan hingga saat ini.

“Dapat kabar forum anak masih berjalan sampai sekarang,” ujarnya.

Puti berharap, melalui forum inovasi tersebut, anak-anak dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab serta memiliki akhlak yang baik.

Meskipun Puti tak lagi di DPPKB, Puti mengatakan siap untuk mendorong segala kegiatan apalagi mengenai bidang yang pernah ia emban yaitu perlindungan terhadap anak dan perempuan.

“Walau sudah tidak di sana, insyallah saya akan tetap bantu sedikit-sedikit. Seperti kemarin pas hari anak saya bersama tim forum anak juga mengadakan acara,” pungkasnya. •Par

# Anto Subianto

## Jiwa Pemadam Tak Pernah Padam

Anto mengawali karirnya di Dinas Pemadam Kebakaran hingga belasan tahun. Suatu hari ia pernah dilempari genting dan gelas saat berusaha memadamkan api. Bagaimana kisahnya?

**A**nto Subianto gemetar setiap kali mendengar sirene mobil pemadam kebakaran (damkar). Sekelebat kenangan saat dia masih menjadi bagian dari damkar terlintas di pikirannya.

Anto memang sempat menjadi personil pemadam kebakaran sebelum sekarang ia menjabat Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

Pria lulusan SMA 1 Lemahabang itu, mengawali karirnya di damkar pada tahun 2002.

Tak tanggung-tanggung kurang lebih 17 tahun Anto menjadi kepala pos jaga di Ciledug.

Meski menjadi kepala pos, bukan berarti ia tak pernah terjun di lapangan. Tak jarang Anto akan turun langsung membersamai petugas lainnya.

“Kadang saya juga harus menyupir sendiri mobil dam-





kar, ketika ada kebakaran atau apapun yang sangat mendesak," ujar pria lulusan STAI Yasmi itu.

Bagi Anto pengalamannya di damkar sangatlah berkesan. Setiap kejadian kebakaran, Anto harus siap kapanpun tanpa melihat waktu dan hari. Ia akan bersedia melaksanakan tugas.

"Pernah suatu waktu ada kebakaran di sebuah pasar, kita terlambat datang karena jaraknya yang jauh. Sampai di tempat, kita dilempari genting sama gelas oleh masyarakat setempat," kenangnya menceritakan.

Anto tak mempermasalahkan, jika sebagian warga marah karena kedatangan damkar kerap terlambat. Menurutnya, musibah kebakaran adalah hal tak terduga. Sementara tim damkar juga perlu persiapan dan

waktu menuju tempat kejadian.

"Jadi memang harus dimaklumi semua. Namun kita akan tetap bersikap baik sekalipun para warga akan marah dengan kita," kata Anto.

Anto mengatakan, seorang petugas damkar harus profesional dalam bekerja meskipun mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat setempat.

"Saat kita masuk lokasi pasti ada saja warga yang inginnya diselamatkan terlebih dahulu. Namun karena kita harus profesional, kita akan utamakan yang paling layak diselamatkan," jelasnya.

Hingga tahun 2020, Anton pun dimutasi dari Dinas Damkar dan beralih tugas di Kantor Kecamatan Greged sebagai Kasu-

bag Umum.

"Saya sempat menjabat kasubag umum di kantor kecamatan. Namun saya mengalami kegunjangan budaya atau *culture shock* karena harus bekerja di ruangan. Dan saya tidak biasa," katanya.

Meski demikian, Anto bukanlah pria yang gampang menyerah. Sebisa mungkin dia menyesuaikan diri agar bisa mengerjakan tugasnya dengan baik.

"Prinsip saya, ditugaskan di manapun saya akan berusaha menikmati pekerjaan itu. Harus terus belajar, dan berikan yang terbaik," ungkapnya.

Kisah menariknya, jauh sebelum Anto menjadi abdi negara, Anto sempat menjadi pebisnis minyak bumi terlebih dahulu.

"Pada tahun 1991 saya punya teman TNI. Saat itu saya ditawarkan oleh dia untuk mendaftar PNS, tapi saya tolak karena waktu itu sedang bergelut bisnis minyak tanah," tuturnya.

Namun saat minyak bumi itu tergantikan dengan gas, Anto pun harus menutup bisnisnya.

Saat ini, di usianya yang tidak lagi muda, Anto hanya ingin fokus pada keluarganya. Belum lagi istrinya yang akhir-akhir ini kerap mengeluh tak enak badan.

"Sekarang sih, kalau hari libur pengen kumpul aja di rumah bersama istri dan anak. Soalnya istri sedang tidak enak badan, jadi harus siap siaga," katanya.

Meski demikian, Anto mengaku, jiwa menjadi personil damkar masih terus ada dan tak pernah padam. Kalau pun Dinas Damkar membutuhkannya, ia akan siap sedia membantu.

"Karena saya mulai karir dari Damkar. Jiwa saya masih damkar. Saya masih peduli, kapan pun kalau dibutuhkan, saya siap untuk membantu," pungkasnya.

•Par

# Komisi I Audit Hilangnya Aset Tanah Desa Serang Kulon

Tak kurang 10 bidang aset tanah desa milik Pemdes Serang Kulon tersita negara. Pemdes berharap, Komisi I dapat membantu agar aset tanah desa dapat dikembalikan.



Pemerintah Desa Serang Kulon, Kecamatan Babakan, menyesalkan hilangnya aset tanah desa yang disita negara akibat kasus penggelapan uang penjualan tanah desa pada 2009 silam. Pasalnya hilangnya aset tanah telah berdampak terhadap pendapatan desa.

Kuwu Desa Serang Kulon Alimudin mengatakan, permasalahan muncul berawal dari pembebasan lahan aset desa untuk proyek pembangunan Tol Kanci-Pejagan. Total tanah desa yang dibebaskan saat itu seluas 2,6 hektare dengan harga tawaran sebesar Rp 780.300.000.

Oknum pejabat Desa Serang Kulon kala itu telah menjualnya dan berjanji tanah desa yang dibebaskan akan dilunasi paling lambat 30 Desember 2013. Namun hingga waktu yang telah ditentukan, tak

ada pembayaran sama sekali.

"10 bidang tanah kas desa harus hilang karena disita negara. Atas kasus tersebut, dua pelaku pejabat desa ditangkap polisi, karena dianggap melakukan tindak pidana korupsi penjualan tanah milik desa," ujar Alimudin.

Alimudin mengaku telah mengunjungi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan kejelasan atas tanah desa yang disita. Ia juga melayangkan surat untuk Kejari Kabupaten Cirebon dan Kementerian Keuangan RI perihal permohonan pengembalian aset tanah desa. Namun hingga kini, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Alimudin berharap, negara dapat mengembalikan aset desa yang telah disita untuk dipergunakan kembali. Ia telah menyampaikan aspirasinya ke DPRD



Kabupaten Cirebon dengan harapan akan menuai hasil.

“Kami hanya ingin aset tanah itu secepatnya bisa dikembalikan ke Pemdes saat ini sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Serang Kulon. Kami ingin DPRD Kabupaten Cirebon bisa membantu memfasilitasi kami,” ujarnya, saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

Mendengar itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Bashori menjelaskan, aset desa hanya bisa dimanfaatkan melalui empat cara. Yakni,

sewa menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna atau bangun guna serah.

Sementara soal tukar menukar aset desa, hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum dengan syarat mendapat rekomendasi izin dari Gubernur dan Kementerian terlebih dahulu.

Namun di lapangan, kata Hasan, sering kali ditemui pelanggaran-pelanggaran pengelolaan aset desa. Seperti penggunaan aset desa untuk hibah.

“Itu sering kali terjadi, aset desa diberikan untuk hibah

lembaga atau yayasan. Padahal sebagaimana aturan itu tidak diperkenankan,” jelasnya.

Politisi PKB itu pun berpesan agar Pemdes Serang Kulon mendata seluruh aset desa dan memasukannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setelah itu membahas pemanfaatannya.

“Saya kira Pemdes Serang Kulon segera lakukan inventarisasi aset tanah kemudian munculkan program dalam APBDes untuk pengelolaan tanah. Itu salah satu cara agar aset tanah desa tidak diklaim dan akhirnya hilang,” tutur HaSsan.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Nurholis menegaskan bahwa aset desa tidak boleh berkurang apalagi hilang. Ia pun berjanji siap membantu Pemdes Serang Kulon menindaklanjuti aset desa yang disita.

“Komisi I akan berupaya menggelar rapat bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Camat Babakan, Kuwu dan BPD Serang Kulon untuk menindaklanjuti keputusan tanah yang disita. Kami juga akan coba berkonsultasi langsung ke Kementerian Keuangan untuk menanyakan atas aset Desa Serang Kulon apakah bisa dikembalikan,” tegas Nurholis.

Ia pun berharap Pemdes Serang Kulon segera mengamankan aset tanah desa yang masih ada dengan melakukan sertifikasi seluruh aset tanah desa atas nama Pemerintah Desa. Setelah itu membuat perdes tentang pengelolaan aset desa.

“Tak kalah penting kami meminta agar Camat Babakan membantu mengawasi aset desa dan mengawal pembuatan Perdes pengelolaan aset desa,” pungkasnya. • **Muiz**

# Wajah Baru Alat Kelengkapan Dewan

Jadwal paripurna perubahan AKD DPRD Kabupaten Cirebon yang sempat molor akhirnya berhasil digelar. Ada wajah baru dalam pucuk pimpinan. Siapa saja?



Setelah sempat mengalami kemunduran karena tak memenuhi kuorum, DPRD Kabupaten Cirebon akhirnya menggelar rapat paripurna perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di ruangan Abhimata Paripurna.

Rapat paripurna tersebut dihadiri 47 anggota DPRD. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana mengatakan, perubahan AKD sejalan dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

“Sebelumnya kami juga telah mengadakan rapat internal pada 7 Juli 2022 untuk membahas perubahan AKD,” ujar Rudiana.

Setelah melalui proses yang panjang, DPRD Kabupaten Cirebon akhirnya menetapkan struktural

baru AKD. Dimulai Komisi I, terpilih Sofwan dari Fraksi Gerindra yang menjabat ketua Komisi I disusul Ahmad Fawaz, wakil ketua dan Tarseni sebagai sekretaris komisi.

Sementara untuk Komisi II, terpilih Pandi sebagai pucuk pimpinan dengan Mohamad Ridwan sebagai wakil ketua dan Titi Sumanti sebagai sekretaris komisi.

Selanjutnya untuk Komisi III, yang semula ketua dijabat Hermanto dari Fraksi Nasdem, kini bergeser ke Fraksi Golkar Anton Maulana, Yoga Setiawan sebagai wakil ketua dan Mad Saleh dari Fraksi PKB sebagai sekretaris.

Adapun Komisi IV ditetapkan Aan Setiawan dari Fraksi PDIP sebagai ketua komisi IV. Disusul, Syahir-

HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON			
NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA	JUMAH
1.	H. TANUNG HIDAYAT	41	✓
2.	HO AMENAH SE	32	✓
3.	ROSIHAN RUSMANA	26	✓
4.	TI MULUS TRISLA AGNES	29	✓
5.	MUNAWIR, SH	41	✓
6.	Drs. RIDWAN MULLI	14	✓
7.	HERIYANTO ST	15	✓



ul Alam, sebagai wakil dan Siska Karina, sekretaris.

Setelah terpilih, Aan Setiawan menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia berjanji akan melaksanakan tugas sebaik mungkin.

“Berkat kepercayaan teman-teman, saya terpilih menjadi Ketua Komisi IV menggantikan Mba Siska. Saya akan bekerja sebaik mungkin untuk mengawasi kinerja eksekutif terutama berkaitan kesehatan, pendidikan, dan sosial,” ujar Aan.

Setelah terbentuknya AKD komisi, selanjutnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon juga ditetapkan dengan stuktural baru yakni, Syaril Romadhony, Hasan Basori, Anton Maulana, dan Rohayati.

Sementara, Badan Musyawarah (Banmus) diisi Darusa utusan komisi I, Mamat Surahmat utusan komisi II, Muklisin Nalahudin utusan komisi III serta Eryati dari komisi IV.

Rudiana juga menyampaikan, Badan Pembentukan Peraturan

Daerah (Bapemperda) terpilih Eryati sebagai ketua, dengan wakil ketua Khanafi dari Fraksi Golkar.

Setelah terpilihnya struktural Bapemperda baru, giliran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiyana Merdeka yang memimpin pemilihan Badan Kehormatan (BK).

“Ada 7 dewan yang menjadi calon ketua BK yakni, Tanung Hidayat, Amenah, Rosihan Rusmana, Mulus Trisla, Munawir, Ridwan dan Heriyanto,” jelas Teguh.

Hingga larut malam, pemungutan suara menentukan jabatan struktural baru BK akhirnya menuai hasil.

Teguh mengumumkan hasil perhitungan suara, Tanung Hidayat memperoleh 41 suara, Amenah 32 suara, Rosihan Rusmana 26 suara, Mulus Trisla 29 suara, Munawir 41 suara, Ridwan 14 poin, dan Heriyanto 15 suara.

Mengetahui terdapat peroleh suara yang sama, Teguh memberikan waktu untuk menentukan pimpinan BK. Meski sempat alot, berdasarkan hasil musyawarah akhirnya terpilihlah Munawir sebagai ketua BK, Rosihan Rusmana sebagai wakil ketua, Tanung Hidayat sebagai sekretaris dan selebihnya menjadi anggota.

Setelah terbentuknya struktural AKD yang baru, Rudiana mengetuk palu sebagai tanda selesainya paripurna AKD. Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan terimakasih atas kerjasama seluruh anggota DPRD. Ia berharap, perubahan baru AKD DPRD akan membawa angin segar dan menambah kesolidan DPRD Kabupaten Cirebon di sisa waktu jabatan.

“Dengan demikian, kami tutup paripurna perubahan AKD baru, kami berharap AKD yang terbentuk akan lebih solid kedepannya,” pungkasnya •Par

# Konsultasi Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak

Kemenkumham mengimbau agar raperda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus memuat 4 hal. Apa saja?



**P**ansus I DPRD Kabupaten Cirebon berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Jawa Barat untuk membahas rencana perubahan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan mengatakan, lawatan kali ini bertujuan agar setiap produk hukum daerah menjadi lebih efektif dan aplikatif dengan memahami masalah perundang-undangan dari sudut filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

“Sehingga koordinasi dan harmonisasi dengan Kemenkumham adalah keharusan,” ujarnya.

Aan berharap, perubahan raperda tentang pem-

berdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 1 Tahun 2018 akan menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak serta berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.

Ia pun menerangkan, Kabupaten Cirebon tengah menyusun masalah perlindungan perempuan dan anak. Sehingga perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi sebelum disahkan.

Bidang Perundang-undangan Kemenkumham Provinsi Jawa Barat Harun Surya menyambut baik langkah Pansus I DPRD Kabupaten Cirebon.

Harun menjelaskan, sejauh ini Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan perlindungan korban kekerasan dan pe-

nguatan dan pengembangan pelayanan.

Namun belum secara spesifik mengatur pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Secara teknis, aturan tersebut baru tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Pasal 6.

Sementara terkait pelaksanaan perlindungan perempuan, tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008.

“Gubernur, bupati, walikota, berkewajiban mengintegrasikan kebijakan program dan kegiatan PKHP untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah,” jelas Harun.

Pengaturan secara khusus tidak mengatur tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Oleh karenanya, Harun mengingatkan, dalam proses menyusun raperda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebaiknya dipertimbangkan beberapa hal.

Pertama, pembentukan raperda harus mencantumkan secara jelas landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal itu bertujuan agar produk hukum yang diharapkan memang kebutuhan mendesak.

“Artinya segi sosiologis misalnya, harus benar-benar dijelaskan pentingnya penanganan secara khusus untuk melindungi perempuan di Kabupaten Cirebon,” kata Harun.

Kedua, dalam memasukan landasan yuridis sebaiknya hanya mencantumkan peraturan pemerintah yang memberikan kewenangan daerah membentuk raperda.



“Karena dasar hukumnya terlalu banyak, maka tak perlu dimasukkan semuanya,” tutur Harun.

Ketiga, dalam muatan raperda terdapat norma yang biasanya mencantumkan rumusan kata

wajib. Harun menyarankan, agar mempertimbangkan kembali. Karena penggunaan kata wajib, berarti mengharuskan perlunya sanksi apabila kewajibannya tidak dipenuhi.

# Berscepat Wujudkan Perda Perlindungan Perempuan

Pansus I tengah bekerja keras untuk mempercepat lahirnya peraturan daerah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Apa yang dilakukan?



**G**una mematangkan rancangan perubahan peraturan daerah mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Cirebon menyambangi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.

Anggota Pansus I DPRD Kabupaten Cirebon Nurholis mengatakan, banyaknya perempuan di Kabupaten Cirebon yang bekerja di luar negeri menjadi alasan pentingnya produk peraturan daerah hadir untuk melindungi mereka.

Di antara kasusnya, Nurholis menemukan tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri karena menjadi korban oleh keluarga maupun oknum. Meski pemerintah pusat telah mengatur Undang-Undang bukan berarti turunan produk hu-

kum itu tidak penting.

“Sementara banyak kasus pekerja perempuan yang menjadi korban keluarga. Uang hasil kerja hilang tidak jelas, bahkan ada juga yang dipakai suaminya untuk biaya nikah lagi. Di peraturan pusat mungkin diatur, tapi belum secara spesifik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Anggota Pansus I DPRD Kabupaten Cirebon Mahmudi berharap rencana Kabupaten Cirebon memiliki perda perlindungan perempuan dan anak dapat segera terealisasi dan didukung oleh semua pihak

“Saya sangat miris ketika mendengar kasus pelecehan terhadap perempuan atau anak, semoga apa yang direncanakan akan terlaksana dengan baik,” tutupnya

Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan Anak Ema Kusuma Cahyaningsih DP3AKB Jawa Barat pun menyambut baik langkah DPRD Kabupa-



ten Cirebon. Ia pun mengamini banyaknya kasus yang menimpa perempuan dan anak di tahun ini. Dari perlakuan tak senonoh maupun pelecehan seksual yang mengganggu mental korban.

Untuk itu, DP3KB Provinsi Jawa Barat juga telah merancang peraturan daerah untuk menjadi landasan dasar pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Diketahui, peraturan tersebut dibagi menjadi 2 kebijakan di antaranya perlindungan anak dan pember-

dayaan perlindungan perempuan.

“Peraturan itu kami pisah menjadi 2 kebijakan. Hal itu agar lebih detail dalam menyusun peraturan,” kata Ema.

Ema menjelaskan, kebijakan perlindungan anak telah ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi Jawa Barat, sementara kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan baru disusun, dan akan disahkan dalam waktu dekat ini.

Perlindungan anak sudah ditetapkan ke dalam Peratur-

an Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021, sementara untuk perlindungan perempuan masih kita godok,” jelasnya.

Dia menuturkan, keduanya sangat penting namun semua itu perlu waktu untuk menghasilkan peraturan yang tepat. Kebijakan perlindungan anak yang ditetapkan pada tahun 2021 bertujuan agar anak mendapatkan perlindungan, dan telah disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

“Kita harus memperlakukan anak dengan baik dan memberikan kesempatan pada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga benar-benar mendapatkan perlindungan dari diskriminatif. Peraturan tersebut benar-benar sudah sesuai,” tuturnya.

Sementara dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dalam rangka mengangkat harkat seimbang antara perempuan dan laki-laki.

“Perempuan memiliki harkat dan martabat samaseperti laki-laki, sehingga perempuan harus dihargai, diakui, diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap perempuan di wilayahnya,” kata Ema.

Ema menerangkan, Gubernur Jawa Barat begitu memperhatikan perlindungan terhadap perempuan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memiliki program dalam upaya memberdayakan perempuan dengan meningkatkan peran mereka di segala bidang.

“Tentu hal itu juga akan menjadi bahasan saat paripurna nanti. Kita mengharapkan perempuan agar lebih mampu, mandiri dan berkarya. Kita berterimakasih atas kunjungan DPRD Kabupaten Cirebon untuk menyingkronkan peraturan daerah ini,” pungkas Ema. •Par

## UMKM Anake Mimi Tembus Pasar Singapura

Bukan sembarang nama, produk UMKM ini diakui telah dijual ke berbagai wilayah di Asia. Saat ini Anake Mimi bersiap kembali ekspor ke Singapura. Bagaimana bisa?



**A**nake Mimi, mungkin terdengar hanya satu ungkapan bahasa Cirebon biasa yang bermakna 'anaknya ibu'. Namun oleh Dali, pemuda asal Desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun, Anake Mimi disulap untuk menjadi nama kudapan renyah nan nikmat.

Berbahan dasar melinjo, Anake Mimi telah cukup familier bagi kalangan pegiat usaha mikro di Kabupaten Cirebon karena keberhasilannya menjual produk hingga ke negara Asia.

"Sebelum pandemi salah satu produk saya emping melinjo Anake Mimi pernah rutin dikirim ke Brunei dan Singapura, yang disalurkan melalui komunitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," ungkap Dali.

Meski saat ini tengah terhenti, Dali mengakui telah diminta kembali oleh pihak Singapura untuk membicarakan kerja sama kontrak ekspor.

"Dulu pernah terhenti karena pandemi, namun bulan ini saya ada janji dengan pihak Singapura un-

tuk bertemu di Bandung," kata Dali.

Selain Brunei dan Singapura, Anake Mimi juga sempat dilirik oleh negara tetangga Malaysia. Namun belum sempat Dali kirim, karena harus menunggu sertifikasi halal sebagai syarat ekspor ke Malaysia.

Dali bercerita apa yang dilakoninya melalui proses yang panjang dan tidaklah mudah. Kepada Cirebon Katon, Dali mengungkapkan awal mula usaha emping itu terwujud. Tahun 2014 tepatnya, Mimi Junia, ibu Dali bekeinginan membuka usaha sendiri setelah bertahun menjadi pegawai pabrik keripik di Cirebon.

Dengan modal seadanya ditambah pengalamannya bekerja di pabrik, Junia memberanikan diri membuat olahan keripik pisang dan emping yang ia jual ke pasar. Saat itu Junia hanya menjualnya secara konvensional.

"Dulu Mimi modal awal cuma 2 juta, dengan alat seadanya, akhirnya Mimi buka usaha sendiri. Belum



ada legalitas, merek bahkan kemasan pun masih pakai plastik biasa,” tutur Dali menceritakan.

Dali yang waktu itu masih bekerja sebagai guru di salah satu lembaga pendidikan di Kota Cirebon, tidak punya cukup waktu untuk membantu ibunya berjualan. Dali pulang ke rumah setiap akhir pekan.

“Dulu mimi jualannya di pasar menggunakan plastik biasa, dan alhamdulillah banyak yang suka. Saya tidak bisa membantu karena waktu itu saya ngajar di MI Nurur Rohmah Kota Cirebon,” ujar Dali.

Seiring waktu, Dali mengatakan pelanggan ibunya semakin bertambah banyak. Bahkan tak

sedikit yang menjadi pengepul untuk dijual kembali dengan nama *brand* yang berbeda. Melihat itu, Dali mulai memutuskan untuk membantu ibunya mengelola usaha keripik pisang dan emping melinjo.

“Tepatnya tahun 2019 saya mulai ikut mengelola usaha Mimi, mulai dari mengurus legalitas sampai nama *brand*,” kata Dali.

Dali beberapa kali mengajukan nama *brand* untuk nama produk ibunya, namun selalu tertolak karena dinilai sudah digunakan.

Tak kehabisan akal, Dali memutuskan Anake Mimi sebagai nama UMKM melinjo mi-

lik keluarganya dan beruntungnya belum ada yang menggunakan.

Saat ini, Anake Mimi telah banyak dikenal orang. Dengan omzet rata-rata Rp 4-6 juta per bulan. Produk Anake Mimi tersedia berbagai macam ukuran dan rasa. Dimulai dari harga yang termurah sebesar Rp 14 ribu.

“Untuk emping melinjo 2 varian rasa yaitu original dan pedas manis. Kalau keripik pisang ada 6 rasa yaitu, original, keju, balado, jagung manis, jagung bakar, dan coklat,” ungkap Dali.

Dali menjual Anake Mimi ke berbagai daerah baik secara langsung maupun via *market place*.

“Paling jauh mencapai Surabaya, Bekasi, dan Bandung. Di online kita juga punya *market place* seperti di Bukalapak, Shopee, dan Blibli itu sudah ada,” jelas Dali.

Dali bersyukur, sempat mengikuti pelatihan UMKM yang digelar Disperdagin Kabupaten Cirebon. Sehingga ia banyak belajar mengelola usaha dari membuat *brand*, merek hingga digital marketing. Selain itu, berkat pelatihan, ia tahu cara ekspor produk.

“Kalau dulu bisa ke Singapura karena komunitas TKI, sekarang berkat mengikuti pelatihan, seluruh UMKM termasuk saya diberi akses untuk bisa ekspor ke luar negeri,” jelasnya.

Dali berharap, Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat terus memperhatikan para pelakuUMKM, dengan ikut serta mempromosikan produk-produk khas Cirebon.

“Kita berharap agar terus diberikan ruang untuk promosi produk. Karena itu juga dapat mengangkat nama baik Cirebon sendiri,” pungkasnya. •Par

## Bojong Wetan

# Senarai Asa Menggapai Desa Maju

Pemdes Bojong Wetan bertekad mengubah citra desa yang dulu sempat dikenal desa tertinggal menjadi desa maju yang unggul pelayanan. Bagaimana caranya?



Pemerintah Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang tengah bergeliat mengubah wajah desa yang semula disebut tertinggal. Mereka membuat perubahan besar. Sebut saja setelah berdirinya gapura di pintu masuk kantor yang sangat megah hingga bangunan beranda desa yang saat ini baru.

Wajah baru kantor desa dibangun atas inisiatif Pemdes Bojong Wetan guna membuat nyaman saat warga berkunjung. Kuwu Desa Bojong Wetan Roja'i Lugisanto mengatakan, upaya serius pemdes membenahi pe-

layanan warga di desa dimulai dari sarana yang layak.

Selanjutnya, yakni menumbuhkan sikap humanis dan responsif seluruh perangkat desa dalam melayani berbagai keperluan administrasi warga.

Roja'i memang dikenal telah malang-melintang dalam dunia birokrasi dan pelayanan publik. Sehingga ia perlahan mengubah taratan dan citra Desa Bojong Wetan.

"Memang dulu sempat di cap desa kami tertinggal makanya kami lakukan ini dan kini mulai bangkit berbenah diri," ujar Roja'i.

Selain terus meningkatkan

kualitas lembaga, Roja'i juga terus berupaya meningkatkan sejumlah sektor strategis dari industri, pertanian, ekonomi maupun sektor strategis lainnya.

Di bidang industri, Pemdes Bojong Wetan akan menciptakan produk busana berupa batik dengan melibatkan sumber daya warga sekitar. Dalam waktu dekat, Pemdes Bojong Wetan berencana membangun ekosistem industri hilir terwujud bekerjasama dengan berbagai pihak.

"Sedang kita upayakan agar ekosistem industri rumahan segera terbangun," katanya.

Sementara itu di sektor pertanian, Roja'i juga secara aktif memberikan penyuluhan terhadap warga tani agar mulai memanfaatkan material organik untuk pupuk tanaman padi. Hal ini bertujuan agar kedepan petani tidak lagi bergantung pada stok pupuk subsidi yang terbatas.

Roja'i mengatakan, tekad mengubah citra Bojong Wetan agar dapat bersaing dan tak kalah dengan desa maju lainnya begitu dilakukan secara serius. Ia hanya berharap, apa yang ia lakukan dapat menghantarkan agar Desa Bojong Wetan segera keluar dari ketertinggalannya.

"Melalui usaha yang sedang dilakukan Pemdes dari pembenahan pelayanan hingga sektor industri dan pertanian, kita berharap Desa Bojong Wetan maju terwujud," pungkasnya. •Mir

## Kemantren

# Berhasil Wujudkan Lingkungan Paling Hijau

Aksi kolaborasi penanaman jadi faktor Kelurahan Kemantren berhasil wujudkan lingkungan yang asri dan sehat. Bagaimana bisa?

Kelurahan Kemantren, Kecamatan Sumber, diakui tengah menjadi sorotan percontohan bagi desa lain di Kabupaten Cirebon. Penyebabnya, Kelurahan Kemantren dianggap berhasil dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Ragam pepohonan kecil tumbuh di setiap sudut kelurahan. Para warga Kemantren telah membiasakan diri untuk menanam tumbuhan di halaman rumah, pinggir jalan hingga kantor desa. Tak ayal ratusan jenis tanaman dapat ditemukan di desa ini.

Aksi menata lingkungan Kelurahan Kemantren yang kompak, berangkat dari kepiawaian Pemerintah Kelurahan Kemantren dan tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang gencar mengajak warga menghijaukan bumi dengan menanam di halaman rumah.

“Kini sudah 80 persen warga Kelurahan Kemantren peduli lingkungan dengan menanam tumbuhan di halaman rumah. Saking pedulinya, bahkan sebagian warga rela memindahkan tanamannya ke halaman kantor desa agar terlihat lebih indah,” ujar Sekretaris Lurah Kemantren Karyono.

Karyono pun mengapresiasi atas kinerja tim PKK dan masyarakat karena telah mewujudkan lingkungan Kelurahan Kemantren yang asri dan sehat.



Keasrian dan sehatnya lingkungan ini akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Ia pun tetap mengajak agar seluruh elemen masyarakat terutama Kelurahan Kemantren untuk terus menghijaukan kelurahan dengan kebiasaan menanam pohon dan bunga. Karena banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan penghijauan.

“Yang jelas dengan kita gemar menanam pohon dan tumbuhan, maka akan memperindah pemandangan, menjaga kualitas air tanah, mencegah polusi udara hingga mencegah efek rumah

kaca,” ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan, lanjut Karyono, Pemerintah Kelurahan Kemantren telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 13 juta untuk program PKK. Anggaran itu dapat digunakan untuk membeli bibit pohon dan tumbuhan yang nantinya dibagikan secara gratis kepada warga binaan PKK.

“Nanti Ibu-ibu PKK yang mencari dan membeli bibitnya. Setelah itu warga bisa mengambil bibit tumbuhan secara gratis untuk ditanam di rumah masing-masing,” ungkapnya. •Muizz

# Warukawung

## Satu Rumah, Satu Sarjana

Agung berharap, melalui program beasiswa pendidikan akan ada manfaat yang dirasakan untuk kemajuan desa. Seperti apa?



Setiap desa pasti memiliki program yang menjadi unggulan untuk memajukan desa. Berbagai tawaran program sudah pasti dicanangkan sejak pencalonan kepala desa.

Tak tekecuali dengan Desa Warukawung, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Di antara program yang telah direncanakan mulai diwujudkan. Salah satunya mengenai program unggulan yakni satu rumah satu sarjana.

Kuwu Desa Warukawung Agung mengatakan program ini merupakan salah satu program unggulannya selama ia menjabat. Program ini merupakan ikh-

tiar Pemdes Warukawung untuk turut serta meningkatkan indeks pendidikan warga.

“Program ini menjangkau masyarakat melanjutkan pendidikan kuliah S1,” ujar Agung.

Agung menambahkan selain program sarjana, ada juga program untuk pemuda yang putus sekolah dengan mengikuti program kejar paket dari mulai SD hingga SMA.

“Kita juga insyaallah ada program paket A sampai C untuk masyarakat tak mampu yang putus sekolah dan ingin melanjutkan pendidikan,” tambah Agung.

Agung telah menyosialisasikan program tersebut melalui

berbagai platform media maupun secara langsung dengan bersilaturahmi ke warga. Agung mengaku, telah bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Cirebon.

“Alhamdulillah kami sudah bekerjasama dengan PC IPNU Kabupaten Cirebon dan beberapa perguruan tinggi untuk program satu desa satu sarjana,” ungkap Agung.

Untuk calon penerima beasiswa, diutamakan semua warga Desa Warukawung yang memiliki ketentuan sesuai dengan regulasi dan persyaratan yang telah ditetapkan Pemdes Warukawung.

“Kita memiliki persyaratan khusus, misalnya pendidikan terakhir harus SLTA/paket C dan harus mau serius untuk melanjutkan pendidikan,” jelas Agung.

Sejauh ini, telah ada 12 warga Desa Warukawung yang telah mendaftar mengikuti program sarjana.

“Yang daftar sudah lumayan kurang lebih 12 orang. Sebagian sudah ada yang masuk kuliah di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Cirebon,” jelasnya.

Agung berharap melalui program itu, selain berguna untuk mencerdaskan masyarakat, juga dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Yakni bersama-sama turut serta dalam membangun desa. •Kus

# Sirnabaya

## Segera Jadi Desa Wisata Budaya

Banyaknya aspek peninggalan sejarah serta kearifan lokal menjadi alasan Desa Sirnabaya ingin menjadi desa wisata. Bagaimana langkahnya?

**D**esa Sirnabaya, Kecamatan Gunungjati dikenal salah satu daerah yang menyimpan banyak peninggalan sejarah Cirebon. Meski demikian, belum semua peninggalan sejarah sejak zaman Kesultanan Sunan Gunung Jati itu dapat terungkap.

Hal itu yang melatar belakangi Desa berjuduk Singopuro itu, mencetuskan ide untuk fokus menjadi desa wisata di wilayah utara Kabupaten Cirebon. Para warga berkeinginan Desa Sirnabaya dapat menjadi magnet wisata dengan tidak hanya menawarkan aspek religi saja. Melainkan juga sejarah dan budaya asli Desa Sirnabaya.

Oleh karena itu, Kuwu Desa Sirnabaya Rawin pun mengaku telah membuat program desa wisata, yang belakangan diketahui menjadi salah satu program unggulan.

Rawin telah membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pelaksana program. Mereka bertugas melacak beberapa situs sejarah yang ada di Desa Sirnabaya untuk memberi nilai tambah demi menggaet wisatawan.

Selain itu, Pemdes Sirnabaya tengah merencanakan pembuatan monumen berupa tokoh dan figur penting pendiri desa untuk mengenang. Tak hanya itu, Rawin juga akan mendirikan sanggar



sebagai sarana untuk melestarikan budaya sekaligus memfasilitasi para pegiat seni.

“Kita memang sedang mengkomodir para pegiat seni untuk menjaga aset dan warisan leluhur agar tak hilang ditelan zaman dengan membentuk sanggar,” ujar Rawin.

Langkah utama sebelum itu, Rawin akan merombak sedikit tata letak kantor desa sebagai beranda depan desa wisata.

Meski demikian, Rawin menjelaskan, biaya yang harus digelontorkan untuk menjadi desa

wisata budaya tidaklah murah. Ia menaksir akan memakan anggaran hingga milyaran rupiah.

“Memang kalau mau serius kurang lebih kita harus gelontorkan Rp 1 miliar anggaran,” jelasnya.

Oleh karenanya Rawin berharap program tersebut dapat disambut baik dan didukung semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Mudah-mudahan program ini bisa didukung penuh agar targetnya cepat selesai,” pungkasnya. •Mir



## Buta Data Desa

Banyak yang mengatakan: “Jika ingin membangun sebuah kabupaten, maka bangunlah desa.” Ada benarnya, namun dalam beberapa aspek, juga butuh pembenahan di tingkat, kecamatan, kabupaten, dan interkoneksi dengan provinsi dan pusat.

“Tapi tetap mulailah dari desa Kang,” ujar beberapa rekan. Tentu saya setuju, namun lagi-lagi ketika proses penyusunan anggaran (APBD), kami sering dihadapkan pada minimnya data pendukung tentang desa. Terutama data yang menjadi landasan kenapa harus membuat program dan menganggarkannya.

Data yang tersedia tidak *update*, alias data lama. Kadang hanya perkiraan. Bahkan, ada yang lebih parah, desa tidak memiliki data. “Ganti kuwu, ganti perangkat, semua data entah kemana, mungkin dibawa perangkat yang lama. Tak hanya itu, formulir atau format dokumen untuk pelayanan masyarakat saja tidak ada, perangkat baru harus buat lagi,” begitu cerita yang mengiringi pembangunan desa.

Jika kondisinya seperti itu bagaimana kita bisa membangun? Bukankah pembangunan itu harus berpondasikan pada data dan kondisi aktual yang akurat? Sulit juga rasanya membuat perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan pemerintah membuat Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebenarnya cukup ideal. Dimana peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat berkesinambungan, juga bisa menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Bagaimana bisa kita akan memberikan jaminan kesehatan dan sosial yang menyeluruh dan tepat sasaran, jika kita tidak tahu siapa saja yang membutuhkan? Jangan sampai kabupaten memberikan anggaran untuk penjaminan yang besar, namun sejatinya kita tidak tahu siapa saja yang dijamin di masing-masing desa.

Bagaimana mungkin kita akan meningkatkan angka lama sekolah, sementara kita tidak pernah tahu siapa saja yang putus sekolah? Data statistik

menunjukkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon hanya 7 tahun. Benarkah? Kalau benar, siapa saja yang putus sekolah? Di desa mana saja? Alamatnya?

Bagaimana bisa kita memberikan pelayanan prima pencetakan KTP, sementara kita tidak tahu siapa saja di tiap desa yang belum memiliki KTP? Berapa rata-rata kebutuhan cetak KTP per bulan per desa akibat hal-hal yang tidak terduga, misalnya hilang atau rusak?

Data statistik menunjukkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon 11,52 persen (2020), namun siapa saja mereka? Tingkat pendidikan mereka seperti apa? Keterampilan atau *skill* mereka seperti apa?

Dari data itu, tentu kita bisa menyusun langkah-langkah pengentasan pengangguran di tiap desa. Tentu ini juga berkaitan dengan data potensi ekonomi desa apa yang bisa diberdayakan? Cukupkah dengan mendirikan dan menguatkan Bumdes? Bagaimana program UKM, kawasan industri, dan pengembangan pariwisata menjawab itu semua?

Bagaimana dengan pertanian menjawab permasalahan ekonomi? Berapa lahan produktif yang tersedia? Berapa dan siapa petani penggarap, serta kebutuhan tenaga kerja? Bisakah diselesaikan dengan program petani milenial, atau mesinisasi?

Belum lagi soal berapa ton kebutuhan pupuk di tiap desa? Berapa kebutuhan irigasi pertanian di tiap desa? Sehingga kita dengan yakin bisa membuat langkah-langkah alternatif pemenuhan pupuk dan pembuatan waduk di tiap-tiap daerah.

Di sektor kelautan pun demikian? Berapa jumlah nelayan? Sejauh mana kemampuan dan teknologi yang digunakan nelayan? Mungkinkah kita membuat program penyediaan kapal besar diatas 30 GT, atau 200 GT? Bagaimana pengelolaan hasil lautnya?

Pertanyaan-pertanyaan itu tentu harus kita jawab dan akan terjawab jika kita memiliki data yang akurat di tiap-tiap desa yang selalu *ter-update*. Saatnya kita membuat sistem data terpadu (*single data system*) yang berbasis desa.

Sehingga kita bisa membangun bukan atas dasar kebutaan data. Bagaimana mungkin kita membangun Cirebon agar *katon*, jika kita sendiri buta akan Cirebon?



**SEKRETARIS DPRD  
DAN SELURUH PEGAWAI**

Selamat  
**Hari Raya  
Idul Adha**

**10 DZULHIJAH 1443 H**





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Selamat

# Hari Raya Idul Adha

10 DZULHIJAH 1444 H

